



Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia tahun 2013

Paramita Asri Widyastuti*, Daffa Amadeuz, Prihandono Wibowo

Program Studi Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60294

Submitted : 08 Juni 2021 Revision : 01 Juli 2021 Accepted : 15 Juni 2022

Abstrak

Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013 mencanangkan *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang menghentikan kedatangan para *irregular migrant*, termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip *non-refoulement* Konvensi 1951 dan Protokol 1968, kebijakan ini juga dinilai melanggar kedaulatan perairan negara-negara tetangga sebab Australia mengembalikan lagi kapal ke perairan internasional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep *rational choice* dengan variabel-variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah Australia meresmikan OSB berdasarkan persepsinya terhadap para pencari suaka, yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, *Rational Actor Model*, Australia, Pencari Suaka

Abstract

Each country certainly has the right to autonomy in determining the direction of foreign policy in accordance with its national interests, including policies related to international migration. Australia in 2013 launched Operation Sovereign Borders (OSB) which stopped the arrival of irregular migrants, including asylum seekers. This policy has been highlighted because it is considered to violate the non-refoulement principle of the 1951 Convention and the 1968 Protocol. This policy is also considered to have violated the sovereignty of the waters of neighboring countries because Australia returned ships to international waters. In this study, the authors analyzed the reasons for Australia's OSB policy inauguration. The author uses the concept of Threat Perception as the basis for analyzing Australian perspectives in taking foreign policy towards asylum seekers, as well as the concept of the Rational Actor Model in answering Australia's reasons for formalizing this policy. The hypothesis of this study is that Australia inaugurated OSB based on its perception of asylum seekers, who are considered to be a threat in their own right in their country. Meanwhile, the OSB policy is considered the most rational solution in dealing with groups of boat people entering Australian waters.

Keywords: Foreign Policy, *Rational Actor Model*, Australia, Asylum seekers

How to Cite: Widyastuti, P. A. dkk (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri : Studi Kasus Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia tahun 2013. *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2): 63-73.

*Corresponding author:

E-mail: mitawdst@gmail.com

PENDAHULUAN

Australia merupakan salah satu negara tujuan yang diminati oleh migran, stabilitas ekonomi dan keadaan domestiknya menjadi faktor pendukung yang menjadikan Australia sebagai negara destinasi dengan minat yang cukup tinggi. Terhitung pada pertengahan tahun 2020, Australia menjadi rumah dari 7.6 juta migran, 14% di antaranya adalah pemegang visa permanen (Australian Bureau of Statistics, 2021) sedangkan 800.000 di antaranya diterima dengan alasan program humaniter yang tak terbatas pada pengungsi saja (Hughes & Keski-Nummi, 2016). Untuk mencapai wilayah Australia sendiri, terdapat 2 jalur yang dapat dilewati oleh migran, yakni jalur laut dan jalur udara. Berbeda dengan jalur udara yang umumnya dilewati oleh para pekerja migran berdokumen lengkap, jalur laut mayoritas dilewati oleh kumpulan individu yang melarikan diri akibat konflik negaranya. Individu-individu ini kemudian memiliki julukan *boat people*, yang mencari suaka ke Australia via jalur laut.

Pada tahun 2013, Australia meresmikan *Operation Sovereign Borders* (OSB) yang dipimpin oleh organisasi militer Australia (Leslie & Corcoran, 2014). Operasi ini memiliki tujuan untuk menghentikan *boat people* atau *irregular migrant arrival* yang umumnya berasal dari perairan Australia. Resmi seiring dengan naiknya Perdana Menteri Tony Abbott, *Operation Sovereign Borders* merupakan salah satu visi utama yang diusung oleh partai koalisi. Berbeda dengan beberapa kebijakan sebelumnya, pada OSB, para

pendatang yang memasuki Australia menggunakan perahu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin bermukim di Australia. Sehingga, mereka akan tetap tinggal di pulau-pulau kecil sekitar Australia seperti Nauru dan Papua Nugini, yang menjadi tempat detensi penahanan tanpa batasan waktu yang jelas (Leslie & Corcoran, 2014).

OSB kemudian memicu kecaman dari dunia internasional, operasi ini dianggap melanggar prinsip-prinsip yang perlu dianut Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968, khususnya prinsip *non-refoulement* atau pelarangan mengembalikan pencari suaka ke wilayah asalnya. Adapun, Australia memindahkan tanggungjawabnya terhadap perahu-perahu yang memasuki wilayahnya kepada pulau-pulau kecil yang menjadi pusat penahanan atau detensi migran ilegal, seperti Pulau Nauru atau Papua Nugini. Tak hanya itu, dengan mengembalikan perahu yang telah memasuki wilayahnya, Australia juga dianggap melanggar kedaulatan teritori perairan Indonesia karena dianggap memasukkan perahu ke wilayah milik negara lain (Elizabeth, Setyawanta, & Trihastuti, 2016).

Namun terdapat justifikasi dan pertimbangan tersendiri oleh sebuah negara sebelum meresmikan suatu kebijakan, tak terkecuali OSB yang dicanangkan oleh Australia. Pada hal ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia tentunya berusaha untuk mengakomodir kepentingan domestiknya terlebih dahulu, sebelum berusaha mengakomodir kepentingan eksternal, dengan berbagai pertimbangan konsekuensi. Maka,

rumusan masalah pada penelitian ini adalah **mengapa Australia meresmikan *Operation Sovereign Borders*?**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menjelaskan alasan mengapa Australia meresmikan kebijakan luar negeri *Operation Sovereign Borders* di tahun 2013 lewat analisis dari beberapa variabel yang digunakan sesuai dengan teori. Data yang diperoleh merupakan data sekunder atau data yang diambil secara tidak langsung, umumnya, data sekunder diperoleh lewat studi pustaka dari artikel ilmiah, buku, laporan resmi, artikel daring dan literatur lainnya (Klotz & Prakash, 2008). Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, pada metode ini, data direduksi dan dipertajam sesuai fokus penelitian lalu kemudian disusun untuk memenuhi kesimpulan pada akhir penulisan (Silalahi, 2009).

PEMBAHASAN

***Boat People* Sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional Australia**

Pada studi keamanan dan strategi, ancaman merupakan situasi dimana sebuah kelompok memiliki kapabilitas untuk menimbulkan konsekuensi negatif terhadap aktor lainnya. Ancaman ini bisa bersifat tradisional maupun non-tradisional, dan dapat dilakukan oleh aktor baik negara maupun non-negara. Senada dengan kajian keamanannya, ancaman tradisional erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat

pertahanan dan *high politics*, sehingga seringkali solusi yang digunakan adalah penggunaan senjata dan kekuatan militer. Namun, seiring dengan pergeseran era dan semakin berkurangnya konflik militer, ancaman pun meluas tak hanya sebatas ancaman tradisional saja tetapi juga ancaman non-tradisional seperti ancaman ekonomi, lingkungan, dan politik misalnya migrasi ilegal, penyelundupan manusia, kekurangan pangan, perubahan iklim, persebaran wabah penyakit, hingga kejahatan transnasional (Marzęda-Młynarska, 2016). Respon yang digunakan pun bergeser menjadi kerjasama, diplomasi, hingga kebijakan luar negeri (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017).

Boat people yang mendatangi wilayah Australia sendiri memiliki keterkaitan dengan lonjakan gelombang pencari suaka, yang kemudian disebut krisis pengungsi. Tentu saja gelombang krisis pengungsi merupakan isu transnasional, atau isu yang tidak hanya berdampak pada satu negara saja dan juga tidak berasal dari satu negara saja. Marzęda-Młynarska menjelaskan, transnasionalisasi krisis migrasi artinya batas-batas negara dalam menangani isu tersebut semakin lama semakin kabur, karena tiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dengan Konvensi 1951 dan Protokol 1968 (Marzęda-Młynarska, 2016). Keragaman identitas dan etnis para pengungsi juga menjadi salah satu faktor mengapa krisis pengungsi termasuk isu transnasional, keragaman ini juga yang menjadi alasan sulitnya

memanajemen lonjakan pencari suaka, karena tidak dapat diprediksi jumlah dan asal para pengungsi tersebut. *Boat people* yang memasuki wilayah Australia sendiri telah memenuhi kedua kriteria 'transnasional' dari ancaman keamanan non-tradisional. Pertama dengan asumsi bahwa *boat people* adalah pencari suaka yang mencari perlindungan ke wilayah Australia, artinya isu tersebut bukan hanya isu domestik yang dialami oleh Australia saja, tetapi juga dialami oleh negara-negara lain di bawah mandat internasional memberikan perlindungan bagi pencari suaka. Kedua, *boat people* yang memasuki wilayah Australia juga tidak berasal dari satu negara saja. Afganistan, Iran, dan Pakistan, Sri Lanka dan Irak menjadi 5 negara yang menjadi asal *boat people* di Australia (Phillips, 2015).

Lalu, pada kasus *boat people* Australia, keinginan untuk segera mendapatkan perlindungan dan kepastian kehidupan mendorong banyak pencari suaka memilih menggunakan laut. Namun juga pada perjalanan untuk sampai ke wilayah Australia, mereka juga beresiko mempertaruhkan nyawa dan biaya kepada agensi *travel* yang membawanya ke tujuan akhir. Sehingga, isu ini bukan hanya menyangkut keamanan nasional saja tetapi juga hak pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan, serta resiko ekonomi dan sosial yang akan dihadapi (Ghamgusar, Sahraei, Malhotra, Norton, & Dell, 2013).

Meskipun pada konsepnya, pencari suaka yang memasuki Australia lewat perairan dan ilegal telah dianggap melanggar kedaulatan Australia sebagai sebuah negara.

Perahu-perahu yang membawa pencari suaka juga dianggap beresiko ditumpangi oleh para penyelundup manusia yang hendak memasuki wilayah Australia tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini kemudian yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Australia, pelanggaran kedaulatan serta potensi kejahatan transnasional yang dibawa oleh para pendatang tanpa dokumen resmi.

Analisis Kebijakan Operation Sovereign Border Australia

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan luar negeri adalah pendekatan level negara, artinya, negara menjadi aktor uniter atau aktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Graham T. Allison menjelaskan bahwa negara merupakan aktor rasional yang tentu saja memilih kebijakan yang berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan negara, selain itu, negara akan memilih kebijakan yang paling menguntungkan dan meminimalisir konsekuensi (Smith, Hadfield, & Dunne, 2016). Model ini berlandaskan pada analisis level negara bangsa yang sesuai dengan perspektif realis, dimana negara merupakan aktor otonom yang memiliki kekuasaan tertinggi di ranah internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Shannon L. Blanton dan Charles Kegley (2016) membagi tahapan dari proses pengambilan kebijakan luar negeri menjadi 4, yakni *problem recognition and definition* atau identifikasi permasalahan, *goals selection* atau solusi beserta tujuan yang hendak dicapai, *identification*

options and alternatives atau pilihan-pilihan kebijakan sebagai bentuk manifestasi dari solusi yang telah dirumuskan, terakhir adalah *choice* atau kebijakan yang dipilih berdasarkan kalkulasi untung rugi masing-masing alternatif kebijakan (Blanton & Kegley, 2016).

Problem Recognition and Definition

Permasalahan yang dihadapi Australia adalah isu *boat people* atau pencari suaka yang memasuki wilayah Australia menggunakan perahu dan jalur ilegal. Isu mengenai pencari suaka berulang kali menjadi isu yang hangat dibahas di ranah politik Australia sejak awal tahun 1990-an, sehingga, *Operation Sovereign Borders* bukanlah kebijakan pertama Australia dalam menangkal perahu-perahu kecil yang akan memasuki wilayah perairannya. Sejak pemerintahan John Howard di tahun 2001, Australia telah memperkenalkan upaya penanganan dan penangkalan bagi perahu-perahu yang masuk ke perairannya secara ilegal, yang juga disebut *Pacific Solution*. *Pacific Solution* sendiri memuat kebijakan yang memindahkan pencari suaka ke pusat detensi di pulau-pulau kecil sekitar Australia seperti Nauru, Pulau Manus, dan Papua Nugini selagi menunggu status permohonan pengungsinya (Wright, 2014).

Hal ini kemudian mendorong pemerintah Australia untuk menghentikan segala bentuk upaya penyelundupan manusia yang melanggar kedaulatan teritorialnya, tidak terkecuali para pencari suaka (BBC, 2017). Pemerintah Australia beranggapan bahwa perjalanan menggunakan perahu selain

melanggar kedaulatan, namun juga berbahaya dan beresiko tinggi terhadap kematian di tengah laut. Belum lagi, harga yang harus dibayar oleh para pencari suaka tidak sepadan dengan resiko yang dihadapi selama perjalanan laut.

Tony Abbott selaku Perdana Menteri yang menjabat ketika resminya OSB menyatakan bahwa penjagaan teritori dari perahu-perahu yang menyelundupkan imigran gelap adalah fokus utama dari pemerintahannya. Hal ini tergambar pada penjelasan Scott Morrison selaku Menteri Keimigrasian dan Penjagaan Perbatasan pada konferensi pers mengenai *Operation Sovereign Border*, 5 hari setelah diresmikan oleh pemerintah Australia (Tang & Hammond, 2014).

“Our resolve to implement what we have promised the Australian people, to stop the boats, is absolute. Those seeking to come on boats will not be getting what they have come for. They will be met by a broad chain of measures end to end that are designed to deter, to disrupt, to prevent their entry from Australia and certainly to ensure they are not settled in Australia,”

Visi misi pemerintahan Tony Abbott dalam menghalau *boat people* juga ikut didukung oleh pembentukan persepsi masyarakat Australia terhadap para pendatang atau pencari suaka, khususnya mereka yang melakukan perjalanan secara ilegal menggunakan perahu. Salah satu bentuknya adalah dikotomi antara *good refugee* dan *bad refugee*, *good refugee* menjadi sebutan kepada pencari suaka yang memasuki wilayah Australia lewat proses

resettlement resmi, baik ditempatkan dari negara transit lainnya atau pulau-pulau kecil yang berada di wilayah sekitar Australia. Sedangkan *bad refugee* merupakan sebutan bagi pencari suaka yang dianggap memotong antrian dengan langsung memasuki perairan Australia menggunakan perahu, yang kemudian disebut sebagai *boat people* (McAdam, 2013).

Sempat terjadi lonjakan angka kedatangan perahu-perahu lewat jalur *irregular* pada tahun 1999 sampai 2001, kemudian angka ini menurun seiring dengan diresmikannya *Pacific Solution*. Mulanya menyentuh angka 51 di tahun 2000, menurun hingga hanya menjadi 1 sampai 7 perahu saja per tahunnya. Barulah di tahun 2009 hingga 2012 angka ini kembali melonjak naik mencapai ratusan, bahkan hampir menyentuh 300 di tahun 2012 (Philips & Spinks, 2013). Lonjakan ini kemungkinan disebabkan oleh melonggarnya kebijakan terhadap para pencari suaka pada era pemerintahan Kevin Rudd (McKenzie & Hasmath, 2013) yang berupaya untuk mengeluarkan kebijakan yang dirasa lebih manusiawi dibandingkan *Pacific Solution*.

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa lonjakan angka kedatangan *boat people* ketika *Pacific Solution* berusaha untuk diubah, serta *boat people* sebagai ancaman non-tradisional merupakan masalah utama yang mendorong pemerintah Australia untuk segera menemukan solusi dalam menangani perahu-perahu yang memasuki perairannya, tak terkecuali bagi para perahu yang mengangkut pencari suaka. Hal ini kemudian berefek pada kemenangan

Tony Abbott yang mengkampanyekan upayanya menghentikan kedatangan perahu-perahu ke perairan Australia, dan menjanjikan kebijakan imigrasi yang lebih komprehensif dan tegas dan berjanji akan segera mengimplementasikannya dalam kurun waktu 100 hari pemerintahannya (Rourke, 2013).

Goals Selection, Identification Options, and Alternatives

Pada variabel selanjutnya adalah *goals selection, identification options, dan alternatives*. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan ekonomi hingga keamanan nasional. Sesuai dengan konteks perlindungan kedaulatan, kepentingan nasional Australia adalah menjaga keamanan, khususnya keamanan perairannya dari kedatangan perahu-perahu yang menggunakan jalur ilegal. Pemerintahan Tony Abbott menjanjikan kebijakan penanganan pencari suaka yang lebih komprehensif bagi Australia (Rourke, 2013).

Kemudian, pilihan alternatif yang dapat dipilih oleh Australia dalam upayanya menangani *boat people*, pada tahap ini juga dilakukan kalkulasi konsekuensi serta keuntungan berdasarkan kepentingan nasional milik Australia. Hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah upaya sekelompok pencari suaka yang dianggap 'melompati antrian' yakni dengan menggunakan perahu dan langsung mendarat di benua utama Australia melewati jalur ilegal. Sehingga Australia memiliki dua pilihan yakni kebijakan dengan pendekatan yang kooperatif atau konfrontatif. Pemerintahan Australia

memiliki pilihan untuk kembali melanjutkan kebijakan *Pacific Solution* yang diresmikan oleh John Howard, atau melanjutkan kebijakan Kevin Rudd yang berupaya untuk menutup pulau-pulau yang menjadi pusat detensi dan memberikan seluruh pencari suaka yang telah mendapatkan *temporary protection visas*, menjadi *permanent protection visas* (Australia Refugee Council, 2021).

Pada kalkulasinya, kebijakan Kevin Rudd pada periode pertamanya menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2007 dianggap lebih manusiawi. Rudd mengutamakan hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga, dan berupaya mencari isu pencari suaka jalan keluar lewat kerjasama dengan negara-negara transit seperti Indonesia. Rudd menempatkan para pendatang yang menggunakan perahu ke Papua Nugini, sembari menunggu aplikasi suakanya diterima oleh Pemerintah Australia (Prastya & Yuniati, 2015). Tetapi, konsekuensi yang ditanggung dari longgarnya kebijakan ini adalah membeludaknya pencari suaka yang kemudian datang ke wilayah Australia (Ramadhani, 2020). Rudd juga menekankan mandate Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968 mengenai penanganan pengungsi, yang artinya, Australia memiliki kewajiban tak hanya sebatas memberikan perlindungan namun juga sebagai tempat dimana pencari suaka akan resettled atau ditempatkan secara permanen serta mendapatkan pengakuan statusnya. Tentu saja kebijakan ini jauh dari kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh Australia, yakni keamanan perbatasan

khususnya perairan Australia. Asumsinya, apabila kebijakan ini dilanjutkan, akan terus terjadi fluktuasi pencari suaka yang dapat mengancam penduduk Australia, khususnya kedatangan perahu-perahu ilegal yang berpotensi membawa ancaman-ancaman lainnya seperti pembawa pelaku kejahatan transnasional, penyakit yang tidak terdeteksi akibat minimnya keselamatan selama perjalanan di laut, hingga individu yang menyalahgunakan perjalanannya untuk melakukan perpindahan wilayah.

Kemudian, kebijakan *Pacific Solution* yang diresmikan John Howard. Kebijakan ini menempatkan para pendatang yang menggunakan perahu ke pulau Manus dan Papua Nugini sembari menunggu eligibilitas aplikasi suakanya atau yang biasa disebut *offshore processing* (Australia Refugee Council, 2021). Pemerintahan Howard juga memperkenalkan *temporary visa protection*, dimana pengungsi hanya akan diberikan 3 tahun visa perlindungan dan harus mengaplikasikan lagi serta membuktikan apabila ia masih membutuhkan perlindungan. Apabila terbukti masih membutuhkan perlindungan, visa yang didapatkan berikutnya adalah visa permanen (Australia Refugee Council, 2021). Kebijakan ini dianggap diskriminatif terhadap para pencari suaka, utamanya *temporary protection visa* mengakibatkan ketakutan para pencari suaka (yang telah mendapatkan status sementara sebagai pengungsi) terhadap resiko dikembalikan lagi ke wilayah asalnya, pemerintahan Australia juga dianggap menggunakan pulau-pulau

kecil di sekitaran Pasifik sebagai tempat pembuangan pencari suaka, belum lagi Australia juga dianggap melanggar Konvensi 1951 dan Protokol 1968 lewat penolakannya dalam menerima pencari suaka yang memerlukan penanganan segera (Wright, 2014). Tetapi, kebijakan inilah yang kemudian mampu menurunkan angka pencari suaka yang datang menggunakan perahu secara drastis dan *outcome* inilah yang hendak dituju oleh Australia.

Choice

Terakhir, adalah kebijakan yang akhirnya dipilih oleh Australia dalam menangani gelombang *boat people* sesuai dengan pertimbangan dan kalkulasi untung rugi. Penulis menganalisis bahwa Australia lebih condong pada kebijakan yang *state centric* meski dianggap diskriminatif dan melanggar hukum internasional. Australia lebih mengakomodasi kepentingan domestiknya ketimbang mengambil resiko yang berimbas pada masuknya imigran- imigran gelap (yang terkadang mencakup pencari suaka). Hal ini tercermin pada keputusan dan kebijakan yang dipilih oleh pemerintahan Tony Abbott, yakni *Operation Sovereign Border*. Berkaca pada timpangnya angka kedatangan *boat people* pada masa pemerintahan John Howard dan Kevin Rudd menjadi garis besar yang dianggap menjadi dorongan Australia untuk kembali mengimplementasikan kebijakan yang hampir mirip dengan *Pacific Solution*, karena kebijakan yang dilonggarkan berpotensi memiliki dampak yang hampir sama seperti pemerintahan Kevin Rudd, fluktuasi angka yang tidak terkendali.

OSB memiliki beberapa poin kebijakan yakni (1) menghentikan perahu- perahu yang hendak memasuki wilayah Australia, serta memberikan dukungan kepada negara transit untuk mencegah pencari suaka melakukan perjalanan ke perairan Australia, (2) mengatur pemulangan penumpang perahu, terlepas dari eligibilitas mereka sebagai pencari suaka, (3) meningkatkan kapasitas penahanan yang berada di Pulau Manus dan Nauru, (4) mengerahkan sekoci untuk mengembalikan pencari suaka yang kapalnya dianggap tidak layak untuk berlaut, (5) memperkenalkan visa perlindungan sementara selagi para pencari suaka menunggu penetapan status pengungsi, (6) menolak permohonan status pengungsi bagi mereka yang dianggap telah menghancurkan dokumen identitas dengan sengaja (Asylum Seeker Resource Center, 2013). Terlihat pula dalam beberapa promosinya, pemerintah Australia benar- benar menegaskan keengganannya untuk menerima perahu- perahu yang memasuki wilayah perairannya. Tercantum kata- kata seperti “*Zero chance of reaching Australia*”, dan “*No way. You will not make Australia home*” yang menegaskan kebijakan Australia terhadap para pencari suaka yang memasuki wilayahnya dengan perahu (Bridge Initiative Team, 2019).

OSB juga memiliki banyak konsekuensi yang harus dihadapi oleh Australia, pelanggaran terhadap prinsip- prinsip yang seharusnya dianut Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968. Salah satu prinsip yang dilanggar adalah prinsip *non-refoulement* atau pengembalian pencari suaka agar

tidak memasuki perairan nasional tanpa pengecekan status, apakah mereka memenuhi kriteria untuk mendapatkan status sebagai pengungsi atau tidak. Selain itu, tindakan ini dianggap melanggar hak asasi mengingat tidak semua kapal yang ditumpangi para pencari suaka merupakan kapal yang layak berlayar. Sehingga, mengembailkan kapal ke perairan internasional memiliki resiko yang cukup berbahaya dibandingkan memberi perlindungan terlebih dahulu. Australia dianggap melepaskan tanggungjawabnya sebagai ratifikator Konvensi Pengungsi, dan malah menempatkan para pencari suaka kepada resiko yang lebih besar, yakni terdampar di perairan internasional dengan sumber daya yang minim (McAdam, 2013).

Selain pelanggaran terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1968, beberapa konsekuensi lain dari kebijakan OSB adalah pelanggaran terhadap kewajiban Hak Asasi Manusia internasional secara umum. Peran Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968 seharusnya bertanggungjawab dalam mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar oleh para pencari suaka di negara asalnya, peran ini kemudian yang diabaikan oleh Australia berkenaan dengan kepentingan nasionalnya dalam menjaga perbatasan (Elizabeth, Setyawanta, & Trihastuti, 2016).

KESIMPULAN

Kebijakan *Operation Sovereign Borders* yang ditetapkan oleh Australia

memperlihatkan *stance* Australia dalam upayanya menangani gelombang pencari suaka yang memasuki wilayahnya menggunakan perahu. Pada analisis penelitian ini, penulis menemukan bahwa *boat people* merupakan ancaman non-tradisional bagi wilayah Australia. Sehingga, dalam upayanya mencegah potensi ancaman yang lebih besar, beberapa kebijakan luar negeri telah ditetapkan oleh Australia menyangkut penanganannya terhadap *boat people* dan hingga saat ini, yang masih terus digunakan adalah OSB.

Pada analisisnya, kebijakan OSB dianggap paling rasional dan memungkinkan dalam menurunkan angka pencari suaka yang menggunakan perahu. Kebijakan ini merupakan cerminan yang hampir mirip dengan *Pacific Solution* milik John Howard di tahun 2001. Berkaca pada pengalaman melonggarkan kebijakan, berimbas pada lonjakan perahu yang memasuki wilayah Australia, pemerintahan Tony Abbott akhirnya meresmikan OSB sebagai kebijakan yang dinilai komprehensif mengakomodasi kepentingan nasional Australia dan menghentikan gelombang perahu yang memasuki perairan Australia.

Sayangnya, kebijakan yang dianggap akomodatif terhadap kepentingan nasional memiliki konsekuensi lebih besar. Australia dianggap melanggar beberapa prinsip hak asasi manusia, Australia juga melanggar kedaulatan perairan Indonesia, serta mengabaikan hak-hak para pencari suaka yang seharusnya menjadi tanggungjawab Australia sebagai ratifikator Konvensi 1951 dan Protokol 1968. Penulis menyimpulkan bahwa memang

kebijakan yang diambil Australia dianggap rasional dan memenuhi kepentingan nasional yakni penjagaan kedaulatan, apabila ditinjau dari perspektif Australia sebagai aktor uniter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allison, G. T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company.
- Blanton, S. L., & Kegley, C. (2016). *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Cengage Learning.
- Caballero-Anthony, M. (2016). Understanding Non-Traditional Security. In M. Caballero-Anthony, *Introduction to the Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach* (pp. 3-19). London: Sage Publications.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*. (D. Suryadipura, & P. Suyatiman, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Smith, S., Hadfield, A., & Dunne, T. (2016). *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford: Oxford University Press.
- Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

Jurnal Ilmiah

- Elizabeth, C. D., Setyawanta, L. T., & Trihastuti, N. (2016). Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia dalam Penanganan Manusia Perahu dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.

- Hughes, P., & Keski-Nummi, A. (2016). Beyond Operation Sovereign Borders: A Long-Term Asylum Policy for Australia. *High-Level Roundtable on Asylum Seeker Policy*. Australia: Centre for Policy Development.
- Jupp, J. (1995). From 'White Australia' to 'Part of Asia': Recent Shifts in Australian Immigration Policy Towards the Region. *International Migration Review*, 29(1), 207-228.
- Marzęda-Młynarska, K. (2016, Juni 23). *Non-Traditional Security Challenges and Regional Governance: EU and ASEAN Answers to the Migration Crisis*. Retrieved from <http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/ce94d4e8-acac-4564-9a24-430824fffa82.pdf>
- McAdam, J. (2013). Australia and Asylum Seekers. *International Journal of Refugee Law*, 25(3), 435-448.
- McKenzie, J., & Hasmath, R. (2013). Deterring the 'boat people': Explaining the Australian government's People Swap response to asylum seekers. *Australian Journal of Political Science*, 48(4), 417-430.
- Peterie, M., & Neil, D. (2020). Xenophobia towards asylum seekers: A survey of social theories. *Journal of Sociology*, 56(1), 23-35.
- Prastya, A. B., & Yuniati, S. (2015). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Australia terhadap Imigran Gelap Pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember*, 12(1), 1-15.
- Ramadhani, M. A. (2020). Kebijakan Australia dalam Menangani Gelombang Pengungsi dan Pencari Suaka di Era Kepemimpinan Kevin Rudd. *LINO: Jurnal Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat*, 55-71.

- Wright, B. D. (2014). *Asylum Seekers and Australian Politics, 1996-2007*. Retrieved from University of Adelaide Digital Library: <https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/84730/8/02whole.pdf>
- Laporan Resmi
Asylum Seeker Resource Center. (2013, Juli). *Operation Sovereign Borders*. Retrieved from Asylum Seeker Resource Center: <https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders-May-2014.pdf>
- Australia Refugee Council. (2021, Maret 1). *Australia's Asylum Policies*. Retrieved from Australia Refugee Council: <https://www.refugeecouncil.org.au/asylum-policies/4/#https://www.refugeecouncil.org.au/timeline/#>
- Australian Bureau of Statistics. (2021, April 23). *Migration, Australia*. Retrieved Mei 5, 2021, from <https://www.abs.gov.au/statistics/people/population/migration-australia/latest-release#:~:text=In%202020%2C%20there%20were%20over%207.6%20million%20migrants,world%20was%20represented%20in%20Australia%27s%20population%20in%202020.>
- Bridge Initiative Team. (2019). *Factsheet: Operation Sovereign Borders*. Bridge: Georgetown University Initiative.
- Phillips, J. (2015, Maret 2). *Asylum Seekers and Refugees; What are the facts?* Retrieved from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/about_parliament/parliamentary_departments/parliamentary_library/pubs/rp/rp1415/asylumfacts#_Toc413067442
- Phillips, J., & Spinks, H. (2013, Juli 23). *Boat Arrivals in Australia Since 1976*. Retrieved Mei 26, 2021, from Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals#_Toc347230715
- Tang, A., & Hammond, D. (2014). *The Push Back Situation in Australia: A Case Study on Human Rights Abuses for Indonesian Migrants and Refugees Trying to Seek Refugee in Australia*. Human Rights at Sea.
- Artikel Online**
- BBC. (2017, Oktober 31). *Australia asylum: Why is it controversial?* Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-28189608>
- Ghangusar, M., Sahraei, F., Malhotra, K., Norton, J., & Dell, J. (2013, September 4). *Australia: Why Boat People Risk It All*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-23933103>
- Leslie, T., & Corcoran, M. (2014, Maret 26). *Operation Sovereign Borders: The First Six Months*. Retrieved from ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2014-03-26/operation-sovereign-borders-the-first-6-months/5734458?nw=0>
- Rourke, A. (2013, September 7). *Tony Abbott, the man who promised to 'stop the boats', sails to victory*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2013/sep/07/australia-election-tony-abbott-liberal-victory>